

Peran DPRD terhadap Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara dalam Aspek Ekonomi Pembangunan

Dewi Chofifah Rahmah¹, Marliyah²

^{1,2} Prodi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
e-mail: dewichofifah99@gmail.com¹, marliyah@uinsu.ac.id²

Abstrak

Salah Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tentang program pemerintah terhadap peningkatan kualitas permukiman di provinsi Sumatera Utara. Dengan situasi, kondisi, dan faktor faktor yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai. Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni dan sarana utilitas umum juga menjadi masalah pembangunan di Sumatera Utara. Untuk itu, telah diusulkan program pengadaan rumah layak huni dan pembangunan sarana utilitas umum untuk masyarakat Sumatera Utara.

Kata kunci: *Komisi D, Permukiman Kumuh, Ekonomi*

Abstract

The role of the DPRD in regional development planning is quite large and dominant. Starting from the making of Regional Regulations regarding the basic pattern of regional development. Then the annual program contained in the APBD (Regional Expenditure Budget) must first obtain approval from the DPRD. A project will not be included in the APBD if the DPRD objected. Before preparing the APBD, the DPRD will first make visits to the regions to absorb the aspirations of the community to be used as provisions in discussions with regional heads. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. This study seeks to describe, analyze and interpret the problems and then draw conclusions from the problems regarding government programs to improve the quality of settlements in the province of North Sumatra. The situations, conditions, and influencing factors are then presented in written form systematically. Slums are a product of population growth in poverty and the lack of government to control growth and provide adequate urban services. There are still many low-income people who do not have decent housing and public utility facilities are also a development problem in North Sumatra. For this reason, a program for the procurement of livable houses and the construction of public utility facilities for the people of North Sumatra has been proposed.

Keywords : *Commission D, Slums, Economic*

PENDAHULUAN

Bahwa peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangat sentral dalam membangun Indonesia sentris. Sebagai lembaga legislatif, DPRD merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah dalam pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Terkait dengan anggaran pemerintahan di daerah, DPRD juga berperan penting dalam alokasi, distribusi dan stabilisasi. Untuk alokasi anggaran, selain eksekutif yang berperan, DPRD juga bertanggungjawab ketika penjarangan aspirasi masyarakat, dengan mengeluarkan prioritas anggaran.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan usaha masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitasnya (Hidayat, 2012). Pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas ekonomi memang merupakan bentuk pembangunan ekonomi yang dianalisis secara meluas. Dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil peningkatan semua modal ekonomi yang dapat mencakup infrastruktur transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya.

Pembangunan saat ini berfokus kepada pemerataan kebutuhan pokok salah satunya adalah pembangunan pada sektor perumahan dan permukiman. Salah satu masalah dalam suatu kota adalah adanya permukiman kumuh. Faktor utama penyebab adanya permukiman kumuh ada dua, yang pertama adalah pertumbuhan kota yang tinggi namun tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup. Faktor kedua yaitu pemerintah kota yang terlambat merencanakan dan membangun prasarana kota, terutama jalan di daerah perkembangan permukiman baru (Sadyohutomo dalam Sadana, 2014).

Aspek ekonomi sebagai faktor tidak langsung yang menyebabkan kekumuhan yang terdiri dari pendapatan masyarakat, pekerjaan masyarakat, serta terbangunnya rumah tidak permanen (Sadana, 2015). Ketika telah terjadi pembangunan fisik atau peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, maka diharapkan aspek non fisik seperti aspek ekonomi juga terbangun menjadi lebih baik.

Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembangunan program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan dampaknya terhadap perekonomian. Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran penelitian yaitu mengkaji dampak pembangunan dari program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh terhadap ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data- data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tentang program pemerintah terhadap peningkatan kualitas permukiman di provinsi Sumatera Utara. Dengan situasi, kondisi, dan faktor faktor yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan

dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara, instrumen penelitian ada penelitian sendiri, pedoman wawancara dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peran dari DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar serta dominan. Dimulai dari pembuatan Peraturan Daerah mengenai pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang harus memperoleh persetujuan dari DPRD terlebih dahulu. Sebuah proyek tidak akan bisa masuk ke APBD jika DPRD merasa keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih akan mengadakan kunjungan pada daerah-daerah guna menyerap aspirasi dari masyarakat untuk dijadikan bekal di dalam pembahasan bersama kepala daerah.

Kepala Daerah serta DPRD sebagai pengarah dalam pembangunan serta sebagai pelaksana dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, harus mengejawantahkan perannya lewat penggalian, pembinaan, serta pengembangan 2 segenap potensi di daerahnya agar bisa membuatnya sebagai modal dasar serta memperhitungkannya dalam penentuan strategi serta arah pembangunan daerah.

Selain berperan besar dalam perencanaan daerah, DPRD juga memiliki peran yang signifikan dalam mengevaluasi pembangunan daerah untuk menentukan nilai maupun pentingnya suatu kegiatan, program, atau kebijakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, serta hasil atau outcome pada rencana serta standar yang sudah ditetapkan. Tujuan dari evaluasi adalah untuk melihat tingkat dari keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil peran DPRD di bidang pembangunan atau peran pada bagian Komisi D yang berada di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Bidang Pembangunan meliputi bina marga, cipta karya, permukiman dan tata ruang, perumahan rakyat, pengelolaan sumber daya air, perhubungan, pertambangan, energi dan sumber daya mineral dan lingkungan hidup. DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis, secara praktik menjadi lembaga perpanjangan tangan masyarakat Provinsi Sumatera Utara atau menjadi representasi rakyat Sumatera Utara. Dalam hal ini, Komisi D sesuai dengan bidang tugasnya telah melaksanakan tugas representatif rakyat. Secara administratif, tugas tersebut berpedoman pada tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) yang pelaksanaannya tertuang dalam tertib administrasi untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Selama periode Januari 2021 sampai dengan 17 September 2021 total surat masuk sebanyak 91 (sembilan puluh satu) surat, sedangkan surat keluar sebanyak 87 (delapan puluh tujuh surat) surat. Tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan ke Komisi D telah ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Kunjungan Kerja.

Hasil Kinerja Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara pada hakikatnya tidak terlepas dari tugas dan fungsi lembaga DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, dengan merujuk pada fungsi kelembagaan tersebut maka disampaikan hasil kinerja Komisi D Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

Pada rencana Sumatera Utara Tahun 2019 yang dilaksanakan pada September Tahun 2019 lalu, Komisi D mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara yaitu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Utara dan Ranperda Pengelolaan Persampahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Tahun 2020.

Usulan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara tersebut belum dapat terlaksana hingga pada rapat kerja ini dilaksanakan. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Komisi D ke Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia terkait pembentukan Ranperda dimaksud menyatakan bahwa "Untuk melakukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Daerah sebaiknya menunggu kebijakan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, sebab dasar hukum pembentukan Ranperda dimaksud menjadi materi muatan yang dibahas dalam UU Omnibus Law dan masih dalam proses pebahasan oleh Pemerintah dan DPR RI".

Demikian juga Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengusulkan Ranperda Pengelolaan Persampahan dan telah masuk dalamn Program pembentukan Perda Provinsi Sumatera Utara tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19 sehingga adanya pembatasan aktivitas kerja di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Utara membuat Komisi D tidak dapat maksimal melakukan pembahasan ranperda tersebut.

Berdasar atas alasan tersebut maka Komisi D belum dapat melakukan tindak lanjut usulan pembentukan Ranperda inisiatif yang telah diusulkan.

2. Fungsi Anggaran

Fungsi Anggaran yang telah dilaksanakan oleh Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara tertuang dalam pembahasan KUA-PPAS untuk Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Dalam hal ini, Komisi D telah melakukan pembahasan anggaran untuk R-P.APD Tahun Anggaran 2021 bersama dengan mitra Komisi D.

Dalam pembahasannya, antara Komisi D bersama dengan mitra Komisi D telah menyepakati anggaran yang akan digunakan untuk program pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan dalam R-P.APD Tahun Anggaran 2021. Hasil pembahasan anggaran tersebut juga telah disampaikan dan dibahas di Bidang Anggaran melalui Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3. Fungsi Pengawasan

Pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Rapat Kerja, Rapat Konsultasi serta Kunjungan Kerja terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja Komisi D khususnya kinerja OPD yang kurang maksimal dan menimbulkan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara sehingga masyarakat melakukan pengaduan ke DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Komisi D.

fungsi pengawasan yang telah dilakukan oleh Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara salah satunya adalah Pengawasan terhadap kinerja OPD yang menangani perumahan dan kawasan permukiman. Masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah layak huni dan sarana utilitas umum juga menjadi masalah pembangunan di Sumatera Utara. Untuk itu, telah diusulkan program pengadaan rumah layak huni dan pembangunan sarana utilitas umum untuk masyarakat Sumatera Utara baik yang dianggarkan pada P.APD Tahun Anggaran 2021. Dan dengan parahnya dampak pandemi Covid-19 ini, Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara juga akan mengusulkan penambahan Anggaran 2022.

Ekonomi

Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran.

Istilah ekonomi berasal dari kata "*oikos*" yang bermakna keluarga atau rumah tangga sementara "*Nomos*" memiliki makna hukum atau peraturan yang berlaku. Jadi, secara harfiah ekonomi dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijakan pemerintah hingga efisiensi penggunaan sumber daya alam

Ilmu ekonomi juga mempelajari pendapatan individu, perusahaan, hingga negara dan harga saham hingga ketidakseimbangan ekonominya. Dengan mempelajari Ilmu ekonomi akan membantu seseorang dalam memahami bagaimana perilaku ekonomi masyarakat tertentu, memberi masukan dalam pengambilan keputusan, memberi pengertian pada potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi yang diambil, hingga meningkatkan kepekaan manusia pada berbagai masalah ekonomi dan global.

Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial, ekonomi pembangunan juga memperluas kesempatan bagi penduduk dengan mendukung perbaikan kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerja melalui sektor publik atau swasta.

Ekonomi pembangunan mencakup perumusan teori dan metode yang menentukan kebijakan dan praktik dan dapat diterapkan di tingkat domestik maupun internasional. Contohnya adalah restrukturisasi insentif pasar atau penggunaan matematika dalam analisis proyek (misalnya optimisasi inter-temporal), atau perpaduan metode kuantitatif dan kualitatif.

Berbeda dengan bidang ekonomi lainnya, pendekatan ekonomi pembangunan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik dalam pembuatan rencana tertentu. Selain itu, tidak ada kepastian soal isu yang perlu dipelajari dalam ekonomi pembangunan. Berbagai pendekatan mempertimbangkan faktor yang mendorong konvergensi atau non-konvergensi ekonomi di tingkat rumah tangga, provinsi, dan negara.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi; pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.^[1] Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik.

Berdasarkan hasil rapat Kerja Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2021 yang dihadiri langsung oleh BAPPEDA Provsu.

Paparan BAPPEDA Provsu:

1. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada Triwulan II Tahun 2021 tercatat tumbuh sebesar 4,95 %. Kondisi ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan kondisi Nasional yang tumbuh sebesar 7,07% pada periode yang sama
2. Pertumbuhan ekonomi Sumut diproyeksikan akan tumbuh pada kisaran angka 3,00 - 4,00 % pada akhir Tahun 2021. Pandemi Covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 diasumsikan sangat mempengaruhi TPT Provsu.

Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan dengan tujuan semua orang turut mengambil bagian. Kemajuan ekonomi adalah suatu komponen esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satu-satunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Melalui pengertian yang paling mendasar, bahwa pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan. Pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial (Todaro, 1987:63).

Dampak dalam pembangunan pada aspek ekonomi secara umum dapat dilihat dari indikator penyerapan tenaga kerja, berkembangnya struktur ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan perubahan lapangan pekerjaan (Suratmo, 1990 dalam Wahyuni, 2019). Salah satu variabel ekonomi untuk melihat kesejahteraan akibat pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat adalah tingkat pendapatan (Supartono dkk., 2011). Melihat dalam indikator kualitas hidup upaya permukiman kumuh, program penanganan kumuh harusnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan dari adanya lapangan kerja baru yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat (Manurung dkk., 2019). Sebagai bentuk pembangunan, setiap pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat (Teja, 2015).

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. meneliti tentang permukiman kumuh, pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, *pertama*, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. *Ketiga*, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berbasis masyarakat dan partisipasi pemerintah daerah.

Program Kerja Komisi D

Hasil Rapat Kerja Komisi D DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 10 September 2021 yang dihadiri langsung oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Paparan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provsu:

1. Rencana Strategis 2019 - 2023 (Perubahan) :
Meningkatnya kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman
 - a. Indikator akses rumah layak huni kondisi awal (2020) 53,55% dan target kinerja/realisasi tahun 2021 58,69% dukungan RPJMN, sesuai target Pokja AMPL dilakukan melalui program pengembangan perumahan dan program peningkatan PSU
 - b. Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha ditangani, kondisi awal (2020) 16,27% dan target kinerja/realisasi Perubahan angka baseline kumuh yang memiliki koordinat lokasi (715,49 Ha) dilakukan melalui Program pengembangan kawasan permukiman
2. Perubahan yang dilakukan Dinas PKP Provsu pada Perubahan RPJMD :
 - a. Perubahan nomenklatur Program kegiatan dan sub kegiatan sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 50/2020
 - b. Penyesuaian indicator yang sejalan RPJMN yang baru RPJMN 2020-2024
 - c. Hasil evaluasi RPJMD 2019-2023 awal yang memerlukan perubahan indicator dan target
 - d. Indikator Dinas PKP menyesuaikan kepada Permendagri 18/2020 yang mengatur tentang Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Renstra 2019-2023 (Perubahan) : Total anggaran Rp. 58.331.047.600.,
 - a. Program Pengembangan Perumahan : Persentase rumah yang difasilitasi target 2021 sebesar Rp. 1.472.071.899
 - b. Program Kawasan permukiman : Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani sebesar 16,27 % sebesar Rp. 20.922.534.150
 - c. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU sebesar 100% sebesar Rp. 12.545.621.677
 - d. Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi : administrasi kantor dan gaji 100% sebesar Rp. 23.390.819.874
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021
 - a. Pendapatan Asli Daerah (Retribusi pemakaian Mess PU Prapat : Rp. 60.000.000
 - b. Total Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal) Rp. 58.331.047.600,-
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provsu : Rp. 23.129.444.474
 - d. Program Pengembangan Perumahan : Penataan kawasan permukiman relokasi korban bencana di Kab. Madina (1 paket) sebesar Rp. 1.472.071.899,-
 - e. Program kawasan Permukiman : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam kawasan permukiman (10 Kabupaten) sebanyak 600 unit
 - f. Program Peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) : Pembangunan PSU permukiman (4 lokasi)
5. Program Strategis Dinas PKP
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - 1) Kegiatan Perencanaan Penataan Rumah Relokasi Korban Bencana Rp. 50.000.000 tahapan saat ini Selesai
 - 2) Pengawasan Penataan Kawasan Rumah Relokasi Korban Bencana R[. 100.000.000 Tahap Pelaksanaan Pengawasan
 - 3) Penataan Kawasan Permukiman Relokasi Korban Bencana di Desa Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal Rp. 1.199.281.899 tahapan saat ini : Sudah Kontrak, Progres 3 % Dalam Proses Pencairan Uang Muka 30%
 - b. Program Kawasan Permukiman :

Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman : Rp. 20.414.584.150 antara lain di Kab/Kota :

- 1) Batu Bara (50 Unit)
- 2) Asahan (50 Unit)
- 3) Padang Lawas (50 Unit)
- 4) Labuhan Batu Selatan (50 Unit)
- 5) Labuhan Batu Utara (100 Unit)
- 6) Serdang Bedagai (50 Unit)
- 7) Dairi (50 Unit)
- 8) Tapanuli Tengah (50 Unit)
- 9) Simalungun (100 Unit)
- 10) Tapanuli Utara (50 Unit)

Sasaran / Belanja :

Honor Tim Teknis Di Kabupaten / Kota, Biaya Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat , Biaya Konsultan Manajemen Provinsi, Biaya Rehab Rumah di 10 Kabupaten sebanyak 600 Unit.

Tahapan Sedang/ Telah Dilaksanakan :

- 1) Koordinasi Dengan Pemkab
- 2) Pemerintah Kabupaten Membentuk Tim Teknis
- 3) Pengajuan Lelang Konsultan Manajemen Provinsi (KMP) (Sudah dikirim ke UKPBJ)
- 4) Recruitment Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) (februari)
- 5) Pelatihan dan Pembekalan TFL (Minggu I April)
- 6) Pengusulan dan Verifikasi Calon Penerima Manfaat (April)
- 7) Penyusunan SK Penerima Hibah (April)
- 8) Kontrak KMP
- 9) Sosialisasi dan Rembuk Warga I (Juli)
- 10) Identifikasi Kebutuhan Bahan Bangunan Per Rumah (Juli, Agustus)
- 11) Survey dan Verifikasi Harga Bahan (Agustus)
- 12) Penyusunan Rencana Teknis (Agustus)
- 13) Rembuk Warga II, Penetapan Panglong (Agustus, September)

Tahap Yang Akan Dilakukan : Pendistribusian Bahan dan Pekerjaan Fisik Rehab Rumah (September s.d Oktober 2021)

- 1) *Kegiatan Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP : Rp. 251.400.000*
Tersusunnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Tentang Kawasan Kumuh Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Yaitu yang telah disampaikan Pemkab/kota dengan luas 10 – 15 Ha
- 2) *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman : Rp. 256.550.000*

Rapat Kerja Pokja PKP dan Forum PKP, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

- 1) Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Kota Tanjung Pura Mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (lanjutan) Pagu Rp. 2.445.078.900 Seluruh Paket Lelang Sudah Pelaksanaan Kontrak dengan Rata-rata 4,23 %
- 2) Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Kab. Samosir Rp. 1.111.399.500
- 3) Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Provinsi Sumatera Utara di Kab. Pak Pak Bharat Rp. 1.000.259.550
- 4) Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman Besilam Mendukung Kegiatan Strategis Daerah Membangun Desa Menata Kota (lanjutan) Rp. 2.000.519.100

- 5) Manajemen Konstruksi Pembangunan PSU Permukiman Rp. 400.000.000
- 6) Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Rusunawa KEK Sei Mangkei Rp. 100.000.000
- 7) Pendataan Kebutuhan PSU Permukiman pada Kawasan Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara Rp. 450.000.000
- 8) Pendataan Kebutuhan PSU Permukiman pada kawasan lintas Kab/kota di Provinsi Sumatera Utara Rp. 450.000.000
- 9) Pengadaan lahan dalam mendukung penyediaan hunian di kawasan strategis melalui pembangunan Rusunawa Terintegrasi Bagi Pekerja KEK Sei Mangkei (Tidak Lelang) Rp. 3.730.368.444
- 10) Biaya Sertifikasi Lahan (Tidak Lelang) Rp. 280.000.00

Tahapan saat ini : Tidak Memberikan Fasilitas Uang Muka, Termin Pembayaran Sesuai Progres Di Lapangan.

Paparan Dinas Perhubungan Provsu:

Kegiatan Prioritas TA. 2021 antara lain :

- a. Penyediaan Fasilitas Keselamatan Jalan (LPJU, Guradrail, Rambu)
- b. Dukungan dalam rangka penanganan Covid-19
- c. Rehabilitasi Kantor UPT Dishubsu
- d. Pengawasan Operasional Angkutan Penumpang Umum dan Barang
- e. Penyediaan Prasarana Pendukung di Terminal dan VIP Room Bandara Kualanamu

Rencana Program Kerja 2022

Penyusunan rancangan awal rencana kerja tahun 2022 telah dilakukan setelah diterimanya surat edaran Gubernur Sumatera Utara nomor 050/1898 tanggal 5 Maret 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2022.

Dalam rancangan awal RKPD telah dirumuskan prioritas pembangunan provinsi Sumatera Utara tahun 2022, melalui arah kebijakan untuk mendukung kegiatan terintegrasi Membangun Desa Menata Kota (MDMK). Masing-masing kegiatan strategis ini memiliki OPD pelaksana dan OPD pendukung.

Dalam rancangan awal RKPD gambaran umum kondisi daerah, telah dinyatakan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2022 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Pemendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mengelompokkan kewenangan pelaksanaan kegiatan perumahan dan kawasan tingkat provinsi dalam 3 program:

1. Program Pengembangan Perumahan (Indikator: Jumlah Rumah Yang Bangun / Difasilitasi)
 - a. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - b. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
 - c. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
 - d. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
2. Program Kawasan Permukiman (Indikator: Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha Ditangani)
 - a. Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha

- 1) Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - 2) Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman kumuh
 - 4) Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - 5) Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - 6) Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha
- 1) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
 - 3) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha
 - 4) Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh
 - 5) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 Ha sampai dengan di Bawah 15 Ha
 - 6) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) (Indikator: Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU)
 - 7) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 - a) Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
 - b) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
 - c) Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang
 - d) Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman
- Pembangunan PSU permukiman juga dapat Mendukung Kegiatan terintegrasi Membangun Desa Menata Kota (MDMK).

SIMPULAN

DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga perwakilan rakyat yang menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik lisan maupun tertulis, secara praktik menjadi lembaga perpanjangan tangan masyarakat Provinsi Sumatera Utara atau menjadi representasi rakyat Sumatera Utara.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. Karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dimana pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari hasil peningkatan semua modal ekonomi yang dapat mencakup infrastruktur transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi; pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku

yang apatis. Tujuan umum program ini adalah untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

SARAN

Pihak Komisi D perlu strategi untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni karna masih banyak penduduk yang menempati rumah tidak layak huni tersebut. Dalam hal ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara seharusnya mengkaji ulang terkait rumah tidak layak huni serta mendata lengkap alamat dan desa disetiap masing-masing kabupaten/kota karena fakta dilapangan sering ditemukan ketidakadilan dan tidak tepat pada sasaran yang seharusnya. Dan kepada Dinas PKP Provsu agar mengevaluasi ulang terkait pembangunan kegiatan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) permukiman di 4 lokasi yang anggarannya sebesar RP. 12.545.621.677.

DAFTAR PUSTAKA

- Sadana, A. S. (2014). *Perencanaan Kawasan Permukiman*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Sukabumi : CV Jejak.
- Hidayat, Sutanto. (2012). *Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Fisik Belajar dari Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Jembatan Suramadu*. Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
- Todaro, Michael. (2001). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 6(I). 43-76.
- Gregory Mankiw. (2001) *Pengantar Ekonomi*. Edisi kedua jilid 1. Gelora Aksara Pratama Jakarta.
- Manurung, H., Aulia, D. N., & Bahri, S. (2019). Dampak Penataan Permukiman Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 1-10.
- Supartono, S., Ashar, K., & Affandi, M. (2011) Analisis Pengaruh Variabel Sosial Ekonomi Masyarakat Urban Terhadap Kemandirian Ekonomi ditinjau Dari Aspek Keuangan, Energi, dan Pangan di Kecamatan Singosari Kapupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics*. Vol. 5(I). 44-56.
- Wahyuni, S. (2019). Dampak Pembangunan Sekat Kanal Pada Aspek Ekonomi di Desa Sungai Bakau Besar Darat Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*. Vol. 6(III).
- Muhammad, J., Pambudi,A. dan Khomsun , S. (2015). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dalam Pembangunan Flyover Jombor di Kabupaten Sleman. *Pelita*, Vol. 10 (1).